

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kuasa peminggiran peran politik perempuan adat dalam komunitas Anak Putu Bonokeling di Pekuncen, Banyumas. Perempuan adat Bonokeling sejak masa awal memiliki posisi otoritatif dalam berbagai ranah kehidupan adat, baik dalam ritual, pengelolaan domestik, maupun forum informal yang menopang kesinambungan tradisi. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran makna dan posisi kuasa perempuan yang tidak sepenuhnya disadari oleh komunitas adat itu sendiri. Pergeseran ini tampak jelas sejak hadirnya negara melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang membuka momentum perubahan relasi kuasa di tingkat lokal termasuk dalam komunitas adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma konstruktivis dan perspektif strukturalis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan Bonokeling bersifat berlapis, meliputi dimensi simbolik, genealogis, domestik, dan kultural yang membentuk fondasi keberlangsungan adat. Namun, peminggiran peran perempuan terjadi secara perlahan dan halus (*soft domination*), melalui keterputusan narasi sejarah yang dikuasai laki-laki, sehingga kepemimpinan perempuan terhapus dari memori kolektif dan bergeser ke ranah domestik serta ritual. Institusi sosial klasik kerajaan, negara dan lembaga adat menjadi aktor yang berkepentingan menjaga eksistensi sistem patriarkal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peminggiran perempuan adat Bonokeling merupakan proses historis yang panjang dan kumulatif, serta membuka urgensi untuk menempatkan perempuan sebagai sumber pengetahuan guna mengungkap narasi yang terputus akibat dominasi androsentris dalam politik adat.

Kata Kunci: kuasa, peminggiran, perempuan adat, Bonokeling, Banyumas

ABSTRACT

This study examines the marginalizing power shaping the political roles of Indigenous women within the Anak Putu Bonokeling community in Pekuncen, Banyumas. Historically, Bonokeling women held authoritative positions across multiple cultural spheres, including ritual practices, domestic management, and informal forums that sustained the continuity of tradition. Over time, however, subtle shifts in meaning and power have occurred changes that are not fully recognized by the community itself. These shifts became increasingly visible following the state's intervention through Village Law No. 6/2014, which initiated transformations in local power relations, including within Indigenous communities. Employing a qualitative case study with a constructivist paradigm and structuralist perspective, this research collected data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, validated through source triangulation. The findings reveal that Bonokeling women's power is layered, encompassing symbolic, genealogical, domestic, and cultural dimensions that form the foundation of customary continuity. Yet their marginalization unfolds gradually and subtly as a form of soft domination, manifested through the disruption of historical narratives controlled by men. As a result, women's leadership has been erased from collective memory and relegated to domestic and ritual domains. Classical royal institutions, the modern state, and customary bodies act as reinforcing agents that preserve patriarchal systems. This study concludes that the marginalization of Bonokeling Indigenous women is a long, cumulative historical process and highlights the urgent need to reposition women as key knowledge holders capable of recovering narratives overshadowed by androcentric dominance in customary politics.

Keywords: power, marginalization, Indigenous women, Bonokeling, Banyumas